



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025 - 2029



SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji Syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat, Taufik dan Hidayah-Nya sehingga Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025-2029 telah berhasil disusun dengan merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Satpol PP dan Damkar Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang akan dijadikan sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja Tahunan serta sebagai alat ukur keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengedepankan pencapaian Visi, Misi Bupati dan Wakil Bupati Sidenreng Rappang Periode 2025-2029.

Kami menyadari bahwa penyusunan Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu mohon masukan dan koreksi dari semua pihak untuk kesempurnaan Renstra ini dan ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk penyusunan Renstra ini hingga selesai.



**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN**

USMAN S.Sos

Pangkat: Pembina Utama Muda

Nip. 19651231 198611 1 045

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	5
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	10
BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	14
2.1 Gambaran Pelayanan	14
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
2.1.2. Sumber daya Satpol.PP dan Damkar	19
2.1.3. Kinerja Pelayanan	28
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	34
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian Layanan	34
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja	36
2.1.7. Kerja sama antar daerah perbatasan.....	36
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis	37
2.2.1 Permasalahan	37
2.2.2 Isu Strategis	41
BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	43
3.1 Tujuan	43
3.2 Sasaran	43
3.3 Strategis	45

3.4 Arah Kebijakan	49
BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ..	51
4.1. Program	51
4.2. Kegiatan	53
4.3. Subkegiatan	53
4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	99
BAB V : PENUTUP	107

DAFTAR TABEL

Sumber daya Aparatur berdasarkan Pangkat/Golongan	19
Data Pendidikan PNS dan P3K	20
Data Pendidikan Tenaga Kontrak	21
Jumlah Tenaga Kontrak berdasarkan Tugas dan Fungsi	22
Jumlah Pejabat Eselon	22
Jumlah Kebutuhan Pegawai berdasarkan Anjab	23
Data Sarana dan Prasarana	27
Realisasi Kinerja pada Indikator IKU	30
Realisasi Kinerja pada Indikator IKK	31
Realisasi Kinerja pada Indikator SPM	32
Realisasi Kinerja pada Indikator Tugas dan Fungsi	33
Pemetaan Masalah Pelayanan	39
Tujuan dan Sasaran	44
Penahapan Renstra	45
Teknik Merumuskan Tujuan dan sasaran	46
Penentuan Lokus Prioritas	47
Penentuan Program Prioritas	48
Penyelarasan Arah kebijakan RPJMD dan Renstra PD	49
Penyelarasan Strategi dan Arah kebijakan	50
Program Perangkat Daerah	52
Teknik merumuskan Program/Kegiatan/Sub kegiatan	54
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan	67
Rencana Program/Kegiatan/Sub kegiatan perlokasi	80
Sub Kegiatan Prioritas	98
Indikator Kinerja Utama (IKU)	99
Indikator Kinerja Kunci (IKK)	102
Indikator Kinerja Daerah (IKD)	104
Indikator Kinerja SPM	105

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alir Penyusunan Renstra PD	3
Gambar 2.1	Struktur Organisasi Satpol. PP dan Damkar.....	13
Gambar 2.2	Peta Wilayah perbatasan Kab. Sidenreng Rappang.....	36

DAFTAR GRAFIK

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kabupaten Sidenreng Rappang atau biasa dikenal dengan Kabupaten Sidrap, merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang terletak kira-kira 183 Km di sebelah Utara Kota Makassar (Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan). Kabupaten Sidenreng Rappang terletak pada ketinggian antara 10 m – 3.000 m dari permukaan laut (Mdpl). Keadaan Topografi wilayah di daerah ini sangat bervariasi berupa wilayah datar seluas 879.85 km² (46.72%), berbukit seluas 290.17 km² (15.43%) dan bergunung seluas 712.81 km² (37.85%). Wilayah datar berada di bagian selatan dan barat. Wilayah perbukitan berada di bagian utara dan timur terutama di Kecamatan Pitu Riawa dan Kecamatan Pitu Riase. Kabupaten Sidenreng Rappang memiliki luas 1.883,25 Km² dengan jumlah penduduk sebanyak 330.198 jiwa (data BPS per 30 Juni 2024). Wilayah Administratif Kabupaten Sidenreng Rappang terbagi dalam 11 Kecamatan, 38 Kelurahan dan 68 desa dengan Ibukota kabupaten berada di Pangkajene kecamatan Maritengngae.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah salah satu Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi tersebut adalah memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran.

Sebagai bagian dari pemerintah daerah, tentunya program, kegiatan dan arah kebijakan setiap organisasi perangkat daerah termasuk Satpol. PP dan Damkar harus selaras dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”**. Dalam mewujudkan visi ini, terdapat beberapa misi yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Salah satu misi Bupati yang relevan dengan tupoksi Satpol. PP dan damkar adalah **“Mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius.”**

Dalam mewujudkan kehidupan sosial kemasyarakatan yang kondusif, berbudaya, beradab dan religius, Satpol. PP dan Damkar menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah dan melaksanakan perlindungan masyarakat serta penanggulangan kebakaran. Tugas-tugas tersebut tentunya telah dituangkan dalam tujuan dan sasaran serta program, kegiatan dan arah kebijakan yang dirangkum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun kedepan dalam masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Penyusunan Renstra merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam regulasi ini disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan Kerja wajib menyiapkan rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah tersebut di jabarkan menjadi beberapa program, kegiatan, subkegiatan dan penganggaran ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kemudian diselaraskan ke dalam penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam

Kebakaran tahun 2025-2029 yang kemudian di singkat menjadi Renstra PD 2025-2029. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra PD secara bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD oleh Bappeda. Bappeda dan Perangkat Daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara rancangan awal RPJMD dan Renstra PD, memastikan keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.

Adapun bagan alir dalam penyusunan Renstra PD 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Gambar 1.1
Bagan Alir Penyusunan Renstra-PD



Alur Penyusunan :

1. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD :

Bappeda menyusun rancangan awal RPJMD yang menjadi dasar bagi penyusunan Renstra PD.

2. Penyusunan Rancangan Awal Renstra PD :
Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renstra PD secara bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.
3. Harmonisasi dan Sinkronisasi :
Bappeda dan Perangkat Daerah melakukan harmonisasi dan sinkronisasi antara rancangan awal RPJMD dan Renstra PD, memastikan keselarasan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan.
4. Musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan) :
Dilakukan forum Musrenbang untuk menjaring aspirasi dan masukan dari berbagai pemangku kepentingan terkait penyusunan RPJMD dan Renstra PD.
5. Penyusunan Rancangan RPJMD dan Renstra PD :
Berdasarkan hasil Musrenbang, Bappeda menyempurnakan rancangan RPJMD, sementara Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan Renstra PD.
6. Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD dan Renstra PD :
Bappeda menyusun rancangan akhir RPJMD, dan Perangkat Daerah menyusun rancangan akhir Renstra PD.
7. Penetapan RPJMD dan Renstra PD:
Rancangan akhir RPJMD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda), dan Renstra PD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).

RPJMD menjadi pedoman bagi penyusunan Renstra PD dan harus mengacu pada RPJMD dalam hal visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan. Renstra PD menjabarkan lebih detail program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam RPJMD.

Dalam mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang dijabarkan dalam Renstra PD 2025-2029, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem keamanan terpadu antara beberapa stake holder dan pemangku kepentingan serta peningkatan koordinasi antar Lembaga dalam meningkatkan keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat berbasis nilai religius dan budaya melalui program Sidrap Aman dan Religius, untuk tercapainya Visi Bupati dan wakil Bupati Sidenreng Rappang yaitu **“Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”** .

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 bahwa Bupati/Walikota memerintahkan seluruh kepala perangkat daerah untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 secara simultan dan terkoordinasi dengan proses penyusunan RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029. Dengan mempertimbangkan semangat otonomi daerah, potensi daerah, dan kearifan lokal, serta untuk memastikan kesinambungan pembangunan daerah dan menjaga kualitas pelayanan kepada masyarakat, pasca pemilihan kepala daerah serentak.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan-peraturan yang digunakan sebagai landasan hukum dalam penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 4829);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia, Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 126);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 Tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1327);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 288);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 581);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 590);
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
22. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonom Baru;
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
24. Peraturan Daerah provinsi Sulawesi Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022-2041 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 Nomor 3. Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 322);
25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2024 Nomor 7);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5).
28. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
29. Surat Edaran Bupati Sidenreng Rappang Nomor : 000.7.2.2/5/Bapperida tentang Pedoman Penyempurnaan Ranwal Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3. Maksud dan Tujuan

3.1. Maksud

Maksud dari penyusunan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah dengan visi misi kepala daerah, memberikan gambaran dan arah kebijakan yang jelas dalam pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran dalam melaksanakan tugas dan fungsi khususnya dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mengacu pada RPJMD Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025-2029 untuk mencapai tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan.

3.2. Tujuan

Adapun tujuan penyusunan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah :

1. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran lebih terarah dan sejalan dengan visi misi Pemerintahan pusat dan daerah;

2. Sebagai acuan bagi pemangku kepentingan dalam merealisasikan dan mengevaluasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang
4. Peningkatan koordinasi antar Lembaga dalam pemeliharaan ketentraman, keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Mewujudkan tata kelola Satuan Polisi Pamong praja dan Pemadam Kebakaran yang efektif, transparan, akuntabel dan inovatif;
6. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, peningkatan kapasitas SDM aparatur dan penguatan mekanisme pengawasan internal.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2025–2029 mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar belakang memuat gambaran kondisi daerah kabupaten Sidenreng Rappang, Gambaran OPD, Visi Misi Kepala Daerah dan Gambaran Kondisi yang mendasari disusunnya Renstra serta bagan alir penyusunan Renstra;
2. Dasar hukum penyusunan memuat regulasi-regulasi yang menjadi dasar dalam penyusunan Renstra dan yang relevan serta signifikan dengan Tupoksi Satpol. PP dan Pemadam Kebakaran;

3. Maksud dan tujuan menjelaskan apa maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra Perangkat Daerah;
4. Sistematika penulisan menjelaskan secara ringkas tentang masing-masing bab dalam Renstra PD.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah menjelaskan tentang
 - 1.1. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah yang memuat tugas dan fungsi Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran serta Struktur Organisasi Perangkat daerah;
 - 1.2. Sumber daya Perangkat Daerah memuat Data sumber daya aparatur dan sumber daya sarana dan prasarana Satpol.PP dan Damkar;
 - 1.3. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah memuat realisasi capaian kinerja IKU, IKK dan SPM tahun 2019-2024 dan target kinerja IKU, IKK dan SPM tahun 2025-2030;
 - 1.4. Kelompok sasaran layanan berisikan obyek yang menjadi sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran;
 - 1.5. Mitra Perangkat Daerah dalam pemberian pelayanan memuat beberapa Organisasi Perangkat Daerah yang mendukung Satpol.PP dan Damkar dalam pemberian pelayanan;
 - 1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja Perangkat Daerah memuat beberapa Badan Usaha Milik Daerah yang turut mendukung dalam pencapaian kinerja perangkat daerah;
 - 1.7. Kerjasama Daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah memuat beberapa daerah yang bisa diajak Kerjasama dalam pelaksanaan tugas Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran.

2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah :
 - 2.1. Permasalahan pelayanan perangkat daerah memuat beberapa permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran;
 - 2.2. Isu Strategis memuat beberapa kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran yang merupakan tugas dan tanggung jawab OPD.

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 menjelaskan apa yang ingin dicapai oleh Perangkat Daerah dalam periode tahun 2025-2029 ;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 menetapkan target-target spesifik yang harus dicapai untuk mencapai tujuan;
3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat uraian pendekatan dan metode yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 memuat pedoman dan prinsip-prinsip yang akan memandu tindakan perangkat daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program memuat Program-program dan outcome satpol.pp dan pemadam kebakaran;
2. Uraian Kegiatan memuat kegiatan yang akan dilaksanakan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target dan

pagu indikatif;

4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB VIII PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan urusan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

2.1. Gambaran Pelayanan

2.1.1. Tugas, fungsi dan struktur organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, kedudukan, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, pada Bab IV menjelaskan tentang tugas pokok, fungsi dan uraian tugas sebagai berikut :

1. Kepala Satuan

➤ Tugas

- a. Membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran yang menjadi kewenangan daerah; dan
- b. Tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.

➤ Fungsi

- a. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban

- umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. Pelaksanaan administrasi ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya;

2. Sekretaris

➤ Tugas

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan Dinas.

➤ Fungsi

- a. Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas;
- b. Pengordinasian penyusunan perencanaan dan pelaporan;
- c. Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;
- d. Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsi.

3. Kepala Bidang Ketenteraman dan Ketertiban umum

➤ Tugas

Melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum, operasi dan pengendalian, pengembangan sumber daya manusia

➤ Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;

- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

4. Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah

➤ Tugas

Melaksanakan penyelidikan, pengawasan dan melaksanakan kerja sama Lembaga dan penindakan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang melanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

➤ Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Penegakan peraturan daerah;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Penegakan peraturan daerah;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang Penegakan peraturan daerah;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Penegakan peraturan daerah;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

5. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat

➤ Tugas

Melaksanakan pengendalian, penertiban, Kerja sama antar daerah serta koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

➤ Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Perlindungan Masyarakat;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Perlindungan Masyarakat;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang Perlindungan Masyarakat;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Perlindungan Masyarakat;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

6. Kepala Bidang Pemadam Kebakaran

➤ Tugas

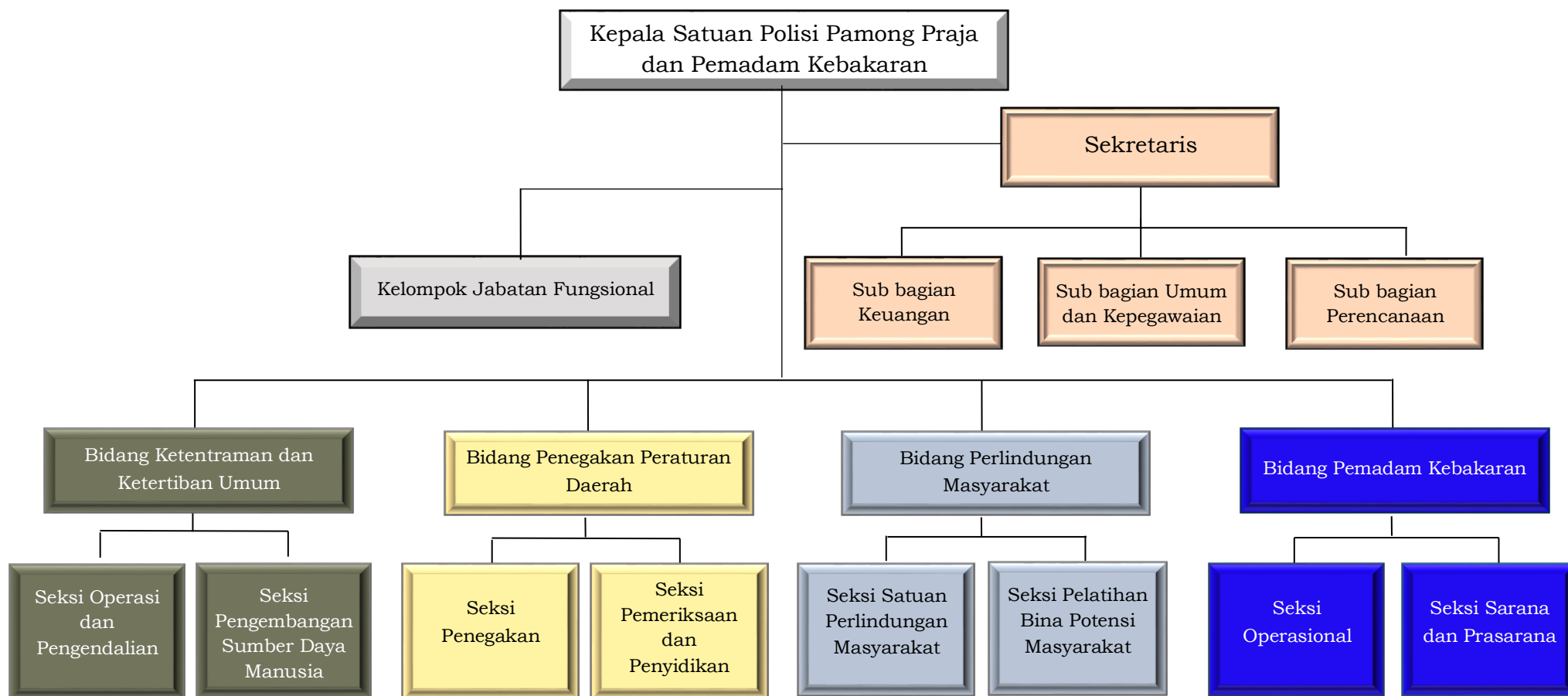
Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kebakaran, menginventarisasi, merawat/memelihara sarana dan prasarana alat pemadam kebakaran.

➤ Fungsi

- a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang Pemadam Kebakaran;
- b. Penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemadam Kebakaran;
- c. Penyiapan bimbingan teknis dan supervise di bidang Pemadam Kebakaran;
- d. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemadam Kebakaran;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

Kelembagaan diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki struktur dengan bentuk piramida, dimana lebih banyak orang berada di tingkat bawah daripada di tingkat atas. Struktur organisasi adalah pembagian kerja dan spesialisasi, kekuasaan hirarkis dan efisiensi tugas dan tanggung jawab. Berikut struktur organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran :

Gambar 2.1
Struktur Organisasi
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran



2.1.2. Sumber Daya Satpol. PP dan Damkar

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang, didukung oleh 66 (enam puluh enam) orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 281 (dua ratus delapan puluh tiga) orang Tenaga Bantuan Operasional dengan jumlah keseluruhan sumber daya aparatur Satpol.PP dan Damkar adalah 347 (tiga ratus empat puluh sembilan) orang per Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1
Jumlah Sumber daya Aparatur Satpol PP dan Damkar Berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	Golongan	JUMLAH		JUMLAH (orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	PNS			
	IV/b	1	1	2
	IV/a	4	2	6
	III/d	4	3	7
	III/c	3	-	3
	III/b	4	-	4
	III/a	11	2	13
	II/d	1	-	1
	II/c	3	-	3
	II/b	1	-	1
	II/a	6	2	8
	I/d	1	-	1
	Jumlah PNS	39	10	49
2	PPPK			
	V	17	-	17
3	Non ASN			
	Satpol. PP	91	37	128
	Linmas	30	-	30
	Damkar	113	10	123
	Jumlah Non ASN	234	47	281
	Jumlah PNS + PPPK + Non ASN	290	57	347

Sumber : Sekretariat Satpol. PP dan Damkar

Dukungan Sumber daya Aparatur yang terdiri dari PNS sebanyak 49 orang, PPPK sebanyak 17 orang dan Tenaga honorer sebanyak 281 orang. Total 347 orang pasukan adalah jumlah angka yang besar untuk suatu organisasi perangkat daerah, namun belum sebanding dengan tugas-tugas di lapangan yang begitu kompleks. baik sebagai petugas pengamanan, penertiban, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan pada kondisi membahayakan manusia yang sama-sama membutuhkan pasukan yang besar.

Adapun data sumber daya aparatur Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) Satpol. PP dan Damkar berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Data Pendidikan PNS dan PPPK
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	Tingkat Pendidikan	JUMLAH		JUMLAH	%
		PNS	PPPK	(orang)	
	ASN				
1	Strata 2	7	0	7	11 %
2	Strata 1	30	0	30	45 %
3	SLTA	11	17	28	42 %
4	SLTP	1	0	1	2 %
	Jumlah	56	10	66	100 %

Sumber : Sekretariat Satpol. PP dan Damkar

Dari tabel data Pendidikan PNS dan P3K diatas, dapat di jelaskan bahwa rata-rata tingkat Pendidikan di kalangan ASN sudah melalui tahap Pendidikan tinggi atau sarjana yaitu sebanyak 7 orang Strata 2 (11%), 30 orang Strata 1 (45 %) dan SLTA sebesar 28 orang (42%) dari jumlah ASN yang ada di Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran. Hal ini tentunya sangat mendukung dalam pelaksanaan tugas Satpol. PP dan Damkar di lapangan yang banyak berbenturan

dan bersentuhan langsung dengan hampir semua elemen masyarakat. Adapun data Pendidikan tenaga bantuan operasional atau tenaga kontrak satpol. PP dan damkar adalah :

Tabel 2.3
Data Pendidikan Tenaga Honorer
Satpol PP dan Pemadam Kebakaran

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH		JUMLAH (orang)	%
		Laki-laki	Perempuan		
	Tenaga Honorer				
1	Strata 2	-	-	-	0 %
2	Strata 1	36	14	50	17,8 %
3	Diploma 3	4	1	5	2,7 %
4	SLTA	172	29	201	71,5 %
5	SLTP	7	-	7	2 %
6	SD	18	-	18	6 %
	Jumlah	237	44	281	100 %

Sumber : Sekretariat Satpol. PP dan Damkar

Dari tabel data Pendidikan tenaga bantuan operasional atau tenaga honorer Satpol. PP dan Pemadam kebakaran diatas, dapat dilihat bahwa rata-rata tingkat pendidikan tenaga honorer Satpol. PP dan Pemadam kebakaran adalah SLTA sebanyak 201 orang atau sekitar 71,5 % dan Strata 1 sebanyak 50 orang atau sekitar 17,8 %. Hal ini, menunjukkan bahwa apabila ditinjau dari kualifikasi pendidikan pegawainya, sudah memadai/menunjang tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagai sebuah institusi Keamanan, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan penanggulangan kebakaran. Untuk yang berpendidikan SD sebanyak 18 (delapan belas) orang dan SLTP sebanyak 7 (tujuh) orang, didominasi oleh Petugas perlindungan masyarakat (Hansip).

Tenaga bantuan operasional atau tenaga kontrak Satpol. PP dan Pemadam kebakaran Kabupaten Sidrap secara tugas dan fungsinya terbagi ke dalam 3 bidang tugas yaitu: Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat dan Satuan Pemadam Kebakaran. Meskipun ketiga bidang tugas tersebut bergabung dalam 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah, namun bidang tugas tersebut memiliki pasukan masing-masing.

Berikut jumlah Tenaga Bantuan Operasional Satpol. PP dan Damkar berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya :

Tabel 2.4
Jumlah Tenaga Kontrak Satpol PP dan Damkar
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

NO	Tugas dan fungsi	JUMLAH		JUMLAH	%
		Laki-laki	Perempuan	(orang)	
1	2	3	4	5	6
1	Polisi Pamong Praja	94	34	128	45 %
2	Satuan Linmas	30	-	30	11 %
3	Pemadam Kebakaran	113	10	123	44 %
	Jumlah	237	44	281	100 %

Adapun data untuk keterisian jabatan eselon pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran jika mengacu pada jabatan Struktural Eselonisasi sudah terpenuhi, yaitu 1 (satu) orang pejabat Eselon II yaitu Kepala Satuan, 5 (lima) orang pejabat eselon III yaitu sekretaris dan Kepala Bidang serta 11 (sebelas) orang pejabat eselon IV yaitu Kepala Seksi dan Kepala sub Bagian. Jumlah pejabat eselon di Satpol. PP dan damkar adalah 17 (tujuh belas) orang seperti yang ditunjukkan pada tabel 2.3 berikut ini :

Tabel 2.5
Jabatan Eselon Satpol PP dan Damkar

No.	Jabatan	Eselon	Jumlah orang
1	Kepala Satuan	II	1
2	Sekretaris	III	1
3	Kepala Bidang	III	4
4	Kepala seksi	IV	8
5	Kepala sub Bagian	IV	3
	Jumlah		17

Sumber : Sekretariat Satpol. PP dan Damkar

Beda halnya untuk pemenuhan jabatan pelaksana dan jabatan fungsional tertentu yang berdasarkan data Analisis jabatan (Anjab) masih terdapat beberapa jabatan yang belum terpenuhi, diantaranya : Analis Penindakan, Pengolah Data Satuan Pengawas Internal, dan lain-lain. Berikut tabel data pegawai satpol.pp dan damkar berdasarkan Analisis jabatan :

Tabel 2.6
**Jumlah Pegawai Satpol PP dan Damkar
 Berdasarkan Analisis Jabatan**

NO.	NAMA JABATAN (PermenPANRB 41/2018)	NAMA JABATAN (PermenPANRB 45/2022)	Kebutuhan	Bezetting		+ ₋
				ASN	PPPK	
1	2	3	4		5	6
1	KEPALA SATUAN		1	1		0
2	SEKRETARIAT		1	1		0
3	SUB BAGIAN PERENCANAAN		1	1		0
4	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Penelaah Teknis Kebijakan	3	1		-2
5	Pengelola Program dan Kegiatan	Pengolah Data dan Informasi	2	0		-2
6	pengelola monitoring dan evaluasi	Pengolah Data dan Informasi	1	0		-1
7	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
8	SUB BAGIAN KEUANGAN		1	1		0
9	Bendahara	Penelaah Teknis Kebijakan	1	1		0
10	Penata Laporan Keuangan	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0		-1
11	Pengelola Keuangan	Pengolah Data dan Informasi	1	0		-1
12	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
13	SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN		1	1		0
14	Analisis Barang Milik Negara	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0		-1
15	Pengelola Kepegawaian	Pengolah Data dan Informasi	1	0		-1
16	Pranata Barang dan Jasa	Pengelola Layanan Operasional	2	0		-2
17	Teknisi Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Pengelola Layanan Operasional	2	0		-2
18	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	3	2		-1

19	BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		1	1		0
20	SEKSI OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN		1	1		0
21	Analisis Keamanan	Penelaah Teknis Kebijakan	2	1		-1
22	Pengelola Keamanan dan Ketertiban	Penata Kelola Keamanan dan Ketertiban	30	4		-26
23	Pengelola Layanan Operasional	Pengelola Layanan Operasional	4	2		-2
24	Petugas Keamanan	Operator Layanan Operasional	20	0		-20
25	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
26		Pengelola Trantibum	30	0		-30
27		PranataTrantibum	30	0		-30
28	SEKSI PENGEMBANGAN SDM		1	1		0
29	Penyusun Kerjasama Pelatihan	Penelaah Teknis Kebijakan	4	1		-3
30	Pengadministrasi Kerjasama Pelatihan	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
31	BIDANG PENEGAKAN PERATURAN DAERAH		1	1		0
32	SEKSI PENEGAKAN		1	1		0
33	Analisis Penindakan	Penelaah Teknis Kebijakan	1	0		-1
34	Pengelola Pelanggaran Peraturan Daerah	Pengolah Data dan Informasi	10	2		-8
35	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
36	SEKSI PEMERIKSAAN DAN PENYIDIKAN		1	1		0
37	Penyidik	Penelaah Teknis Kebijakan	4	1		-3
38	Pengolah Data Penyidikan dan Barang Hasil Penindakan	Pengolah Data dan Informasi	2	0		-2
39	Pengolah Data Satuan Pengawas Internal	Pengolah Data dan Informasi	10	0		-10
40	Pengolah Data Tindak Lanjut Pemeriksaan	Pengolah Data dan Informasi	2	0		-2
41	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1

42	BIDANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1	1		0
43	SEKSI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1	1		0
44	Analisis Pengawasan Masyarakat	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0		-3
45	Pranata Perlindungan Masyarakat	Operator Layanan Operasional	5	0		-5
46	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
47	SEKSI PELATIHAN BINA POTENSI MASYARAKAT		1	1		0
48	Analisis Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0		-3
49	Analisis Kerjasama	Penelaah Teknis Kebijakan	3	0		-3
50	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
51	BIDANG PEMADAM KEBAKARAN		1	1		0
52	SEKSI OPERASIONAL PEMADAM KEBAKARAN		1	1		0
53	Analisis Kebakaran	Penelaah Teknis Kebijakan	10	1		-9
54	Pranata pemadam Kebakaran	Pengelola Layanan Operasional	10	5		-5
55	Pengemudi Mobil Pemadam Kebakaran	Operator Layanan Operasional	11	1		-10
56	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
57	SEKSI SARANA DAN PRASARANA		1	1		0
58	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	Penelaah Teknis Kebijakan	5	1		-4
59	Pemelihara Sarana dan Prasarana	Operator Layanan Operasional	5	0		-5
60	Pengadministrasi Umum	Pengadministrasi Perkantoran	1	0		-1
TOTAL JABATAN STRUKTURAL			232	39	0	-209

NO.	NAMA JABATAN FUNGSIONAL	JENJANG	Kebutuhan	Bezetting		+ -
				PNS	PPPK	
1	Polisi Pamong Praja	Ahli Madya	3	-		-3
		Ahli Muda	3	-		-3
		Ahli Pertama	10	3		-7
		Penyelia	7	-		-7
		Pelaksana Lanjutan	7	-		-7
		Pelakana	20	7		-13
		Pemula	20	-		-20
2	Analisis Kebakaran	Ahli Madya	2	-		-2
		Ahli Muda	2	-		-2
		Ahli Pertama	7	-		-7
3	Pemadam Kebakaran	Penyelia	2	-		-2
		Mahir	2	-		-2
		Terampil	3	-		-3
		Pertama	20	-	17	-3
4	Penyidik	Ahli Madya	1	-		-1
		Ahli Muda	1	-		-1
		Ahli Pertama	2	-		-2
5	Perencana	Ahli Muda	1	-		-1
		Ahli Pertama	1	-		-1
6	Arsiparis	Ahli Madya	1	-		-1
		Ahli Muda	1	-		-1
		Ahli Pertama	1	-		-1
TOTAL JABATAN FUNGSIONAL			117	10	17	-90
TOTAL JABATAN SELURUHNYA			349	49	17	-299

Dari tabel Analisis Jabatan di atas, dapat di ketahui bahwa masih terdapat beberapa jabatan yang belum terpenuhi bahkan tidak terisi, baik berdasarkan **PermenPAN-RB Nomor 41 Tahun 2018** maupun **PermenPAN-RB Nomor 45 Tahun 2022**. Hal ini tentunya cukup berpengaruh dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta pencapaian target kinerja satpol.PP dan Damkar. Contoh yang paling mendasar adalah belum adanya Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sidenreng Rappang, padahal jabatan ini sangat penting terutama dalam penegakan peraturan daerah. Demikian pula halnya dengan jabatan-jabatan pelaksana lainnya yang tentunya memiliki peran masing-masing.

Sumber daya lain yang juga sangat menunjang kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dalam menjalankan Tugas dan Fungsi, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran tidak lepas dari prasarana peralatan kerja dan alat pelindung diri. Adapun sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran per Januari 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7
**Data Sarana dan prasarana
Satpol PP dan Damkar Sidenreng Rappang**

No	N a m a	Jumlah	Kondisi	
			Baik	Rusak
1	Gedung Kantor	2	1	-
2	Bangunan Pos Satpol. PP	3	3	-
3	Bangunan Pos Damkar	2	2	-
4	Garasi Mobil Damkar	2	2	-
5	Mobil Operasional Satpol. PP	3	2	1
6	Mobil Operasional Damkar	10	8	2
7	Kendaraan dinas Roda 4	2	2	
8	Kendaraan dinas Roda 2	15	10	5
9	Alat Kantor dan Rumah Tangga	79	50	29

10	Tandon Air	1	1	-
11	Selang Damkar 1.5	26	22	4
12	Selang Damkar 2.5	8	6	2
13	Nozzle gun 1.5	15	12	3
14	Nozzle gun2.5	3	1	2
15	Mesin Pompa Air Alkon	12	9	3
16	Nozzle jet 1.5	4	1	3
17	Nozzle jet 2.5	3	1	2
18	Y connection	8	6	2
19	Tangga Damkar	3	2	1
20	Tabung Apar 3 kg	10	10	-
21	Tabung Apar 5 kg	1	1	-
22	Tabung Apar 6 kg	4	4	-
23	Tabung Apar 9 kg	2	2	-
24	Chain Saw	2	1	1
25	Tabung SCBA	4	4	-
26	Jaket Tahan Panas	16	8	8
27	Helm Pemadam	16	8	8
28	Tongkat Ular	6	6	-
29	Tenda besar Satpol.PP	1	-	1
30	Tamen Huru Hara	12	-	12
31	Velbed Almunium	12	-	12
32	Helm Satpol PP	12	-	12
33	Rompi Satpol PP	12	-	12

2.1.3. Kinerja Pelayanan Satpol. PP dan Damkar

Kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kegiatan/kebijakan dalam mewujudkan tujuan, sasaran, visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan perangkat daerah.

Kinerja bisa diketahui hanya jika perangkat daerah tersebut mempunyai kriteria keberhasilan yang telah ditetapkan. Kriteria keberhasilan ini berupa tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Tanpa tujuan dan sasaran kinerja, organisasi perangkat daerah tidak mungkin dapat diketahui keberhasilannya karena tidak ada tolak ukurnya.

Indikator kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara tidak langsung yaitu hal-hal yang sifatnya hanya merupakan indikasi-indikasi kinerja. Ukuran kinerja mengacu pada penilaian kinerja secara langsung. Indikator kinerja dan ukuran kinerja ini sangat dibutuhkan untuk menilai tingkat ketercapaian tujuan, sasaran dan strategi. Indikator kinerja dapat berbentuk faktor-faktor keberhasilan utama atau Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK).

Indikator Kinerja Utama adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan pemerintah daerah. IKU membantu dalam mengukur efisiensi, efektivitas, kualitas pelayanan, dan dampak dari program-program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Indikator Kinerja Kunci adalah ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. IKK membantu pemerintah daerah dalam mengukur capaian target pembangunan dan efektivitas program yang telah dilaksanakan. IKK merupakan indikator yang spesifik dan terukur untuk menilai kinerja dalam berbagai urusan pemerintahan daerah seperti Satpol. PP dan Pemadam kebakaran.

Kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 dapat dilihat dari beberapa sasaran indikator diantaranya : Indikator Kinerja Utama (IKU), Indikator Kinerja Kunci (IKK), dan Indikator

SPM. Untuk capaian kinerja pelayanan berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU), disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.8
Kinerja Pelayanan
Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Indikator	Satuan	Realisasi					Kondisi Awal 2024	Target					
			2019	2020	2021	2022	2023		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	75	89	95	92	97	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	67	80	80	80	89	89	90	90	92	92	93	95
3	Cakupan petugas perlindungan masyarakat	%	31	31	29	31	31	30	30	35	35	40	40	45
4	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83	70	80	81	72	83	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah Polisi Pamong Praja yang memiliki kualitas sebagai PPNS	Orang	-	-	-	-	-	-	1	2	2	3	3	3
6	Tersedianya SOP dalam Penegakan Perda dan Perkada serta penanganan gangguan trantibum	Dokumen	6	6	6	6	6	6	6	6	8	8	8	8
7	Tersedianya sarana prasarana minimal	Unit	28	28	28	28	28	28	28	29	30	31	32	32

Tabel diatas menyajikan realisasi capaian pada berbagai indikator yang berkaitan dengan kinerja pelayanan Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2019-2024 serta target Layanan pada Indikator kinerja utama tahun 2025-2030. Realisasi pada beberapa Indikator adalah hasil dari sebuah formulasi. Untuk capaian persentase gangguan trantibum yang diselesaikan adalah jumlah gangguan trantibum yang diselesaikan dibagi jumlah seluruh laporan gangguan trantibum dikali seratus persen. Untuk persentase jumlah perda dan perkara yang ditegakkan adalah jumlah perda dan perkara yang ditegakkan dibagi jumlah seluruh perda dan perkara yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum dikali seratus persen. Sedangkan persentase layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah jumlah layanan dalam waktu tanggap dibagi jumlah seluruh layanan kebakaran dikali seratus persen.

Tabel 2.9
Kinerja Pelayanan
pada Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator IKK RPD	Satuan	Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	89	95	92	97	100
2	Persentase Penegakan PERDA	%	70	80	82	89	89
3	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) daerah layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK)	%	70,42	87,69	70,73	80	82,57
4	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda	%	70	80	100	100	100
5	Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban kebakaran	%	70	89	86	90	83

Pada tabel 2.9 menunjukkan realisasi kinerja pelayanan pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) tahun 2020-2024. Indikator kinerja kunci sebagai alat untuk mengukur sejauh mana Organisasi Perangkat daerah telah mencapai tujuan yang ditetapkan.

Tabel 2.10
Kinerja Pelayanan pada Indikator SPM

No	Indikator SPM	Satuan	Realisasi					Target RPJMD				
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
1	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	%	70	80	100	100	100	100	100	100	100	100
2	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	70	89	86	90	83	100	100	100	100	100

Sumber :

Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada adalah Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada dibagi jumlah penegakan hukum perda dan perkada dikali 100 %.

Persentase jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran adalah Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan atau perangkat daerah + jumlah layanan pemadaman di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

atau Perangkat Daerah di bagi seluruh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran kab/kota dikali 100%.

Tabel 2.11

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Satpol. PP dan Damkar
Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 - 2023**

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD	Target Renstra OPD Tahun ke -						Realisasi Capaian Tahun ke -						Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	40	45	47	50	55	3	40	45	47	50	55	3	
2	Persentase penegakan PERDA	70	75	80	85	90	90	70	75	80	85	90	90	
3	Tingkat waktu tanggap (respon time rate) daerah layanan wilayah manajemen kebakaran (WMK)	83.95	70.42	80	81,5	83,5	83	83.95	70.42	80	81,5	83,5	83	

Sumber : Renstra Satpol.PP dan Damkar 2018-2023

2.1.4. Kelompok Sasaran Pelayanan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, sebagaimana amanat **UU Nomor 23 Tahun 2014** Lembar No.56791 pasal 256 ayat (7) yang menjelaskan Tugas, Pokok, dan Fungsi Satpol PP adalah Menegakkan Perda dan Perkada, Menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, Menyelenggarakan Pelindungan Masyarakat, melaksanakan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran. Untuk itu kelompok sasaran pelayanan bagi Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran adalah sebagai berikut :

1. Masyarakat umum

Meningkatnya keamanan dan ketertiban masyarakat umum berbasis nilai religius dan budaya melalui penyelesaian gangguan Ketentraman dan ketertiban umum serta penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran

2. Perda dan Perkada

Penegakan Peraturan Daerah, Peraturan kepala daerah dan Peraturan Bupati menjadi salah satu tugas utama Satpol. PP.

3. Aparatur Pemerintah Daerah

Penegakan Kedisiplinan Pegawai Negeri sipil dan aparatur pemerintah daerah lainnya di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

4. Pelaku Usaha dan Industri

Pelaku usaha dan Industri adalah salah satu bagian kelompok masyarakat yang rawan terhadap pelanggaran peraturan daerah terkait izin usaha dan ancaman bahaya kebakaran.

2.1.5. Mitra Perangkat daerah Dalam Pemberian Layanan

Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan Ketentraman dan ketertiban umum, Perlindungan masyarakat, Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, Satpol. PP dan Damkar menjalin kerja sama lintas sektor dengan berbagai perangkat daerah. Kerja sama

ini mencakup dukungan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi layanan Trantibum. Berikut adalah perangkat daerah yang menjadi mitra dalam pemberian layanan :

1. Dinas Sosial

Saling mendukung dalam pencegahan penyakit sosial masyarakat, penertiban pengemis, anak jalanan, dan ODGJ.

2. Dinas Kesehatan

Memberikan layanan kesehatan darurat dan penanganan korban luka terhadap Tindakan penertiban dan korban kebakaran

3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Berperan dalam mitigasi bencana, penanggulangan bencana dan pemulihan sarana prasarana pasca kebakaran.

4. Dinas Perhubungan

Mendukung dalam pengaturan lalu lintas saat tanggap darurat bencana.

5. Dinas Komunikasi dan Informatika

Menangani penyebaran informasi bencana, peringatan dini, dan komunikasi darurat.

6. Dinas Pendidikan

Melaksanakan sosialisasi dan simulasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran di lingkungan sekolah.

8. Dinas Lingkungan Hidup

Terlibat dalam mitigasi risiko bencana berbasis ekosistem serta rehabilitasi lingkungan pasca bencana.

9. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)

Sebagai mitra dalam integrasi kebijakan pelayanan keamanan, ketertiban dan perlindungan masyarakat ke dalam dokumen perencanaan daerah.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pencapaian kinerja

Pencapaian kinerja perangkat daerah tidak bisa lepas dari dukungan seluruh lapisan masyarakat. Begitu pula kehadiran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) juga sangat dibutuhkan terutama dalam pencapaian kinerja perangkat daerah. Adapun beberapa BUMD yang memiliki peran dalam mendukung pencapaian kinerja perangkat daerah yaitu :

- ✓ Bank Sulselbar mendukung dalam kelancaran pencairan anggaran dan pendanaan khususnya yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja;
- ✓ PDAM mendukung dalam suplai air bersih saat musim kemarau dan saat terjadi kebakaran.

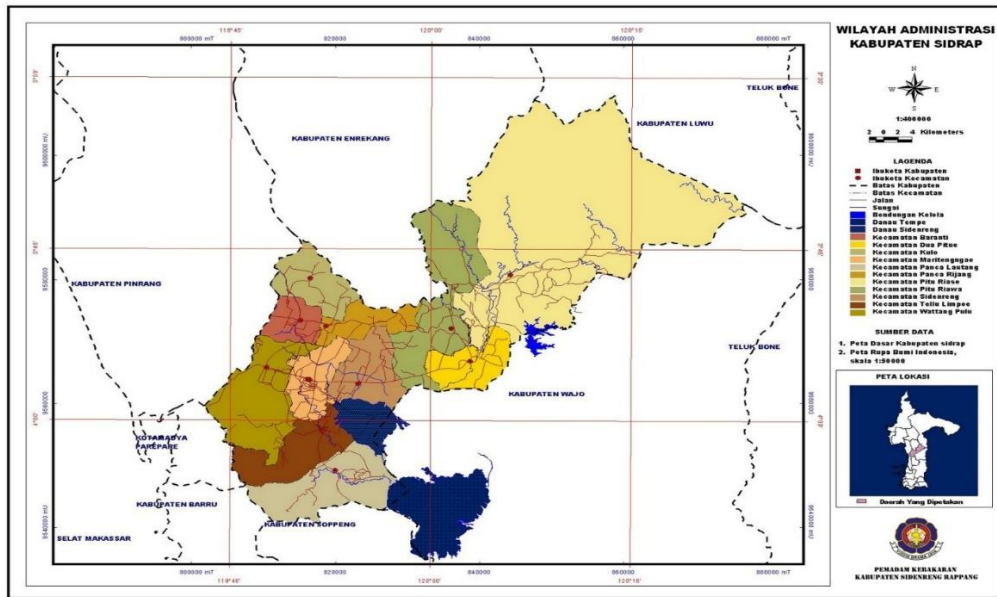
1.7. Kerja sama antar Daerah Perbatasan

Secara astronomis, Kabupaten Sidenreng Rappang terletak antara 3°43' - 4°09' Lintang Selatan dan 119°41' - 120°10' Bujur Timur, masing-masing berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Enrekang dan Kabupaten Pinrang
- Sebelah Timur : Kabupaten Luwu dan Kabupaten Wajo
- Sebelah Selatan : Kabupaten Barru dan Kabupaten Soppeng
- Sebelah Barat : Kota Parepare dan Kabupaten Pinrang

Gambar 2.2

Peta wilayah perbatasan Kab. Sidrap



Kerja sama antar daerah perbatasan menjadi hal yang wajib dilakukan pemerintah daerah termasuk dalam hal penanggulangan kebakaran. Hal ini telah dilakukan pembahasan di tingkat provinsi dan dengan beberapa daerah tetangga seperti Kota Pare-pare dan Kabupaten Wajo. Walaupun sampai dengan akhir tahun 2024 belum ada MOU kerja sama yang tercipta, namun jauh sebelumnya telah ada saling mendukung dalam penanggulangan kebakaran di wilayah perbatasan.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan

Belum Kondusifnya Kondisi Keamanan, Ketertiban Umum serta Kehidupan Sosial Masyarakat tercermin dari angka kriminalitas di Kabupaten Sidenreng Rappang yang mengalami kenaikan signifikan dari 400 kasus di tahun 2021 menjadi 834 kasus di tahun 2024. Tingginya angka kriminalitas menjadi permasalahan serius bagi pemerintah daerah khususnya Satpol. PP dan Damkar dalam menjaga keamanan dan ketertiban serta perlindungan masyarakat. Peningkatan angka kriminalitas ini didominasi oleh penipuan berbasis IT, penyalahgunaan narkoba, prostitusi dalam kedok tempat hiburan malam (THM) dan perjudian juga meningkat, meskipun illegal, di banyak tempat mereka tetap

bertahan karena adanya permintaan pasar dan seringkali terkait dengan jaringan kriminal terorganisir. Tingginya angka kriminalitas ini tidak hanya berdampak pada korban langsung, tetapi juga memiliki efek domino terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rendahnya pengamalan nilai-nilai/norma lokal kebudayaan dan agama dalam kehidupan sehari-hari sangat berkontribusi pada meningkatnya angka kriminalitas. Sedangkan tingginya angka kriminalitas semakin mengikis kepercayaan dan solidaritas dalam masyarakat. Akibatnya, terjadi penurunan kualitas kehidupan sosial, rasa aman, dan keharmonisan dalam masyarakat. Situasi ini dapat menghambat partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengurangi daya tarik daerah bagi investasi, dan pada akhirnya mempengaruhi kesejahteraan dan kemajuan daerah secara keseluruhan.

Pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 46 Tahun 2016 adalah Menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang ketentraman, ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran. Dalam pelaksanaan tugas-tugas tersebut, tentunya menjadi tantangan yang tidak lepas dari timbulnya permasalahan-permasalahan secara internal seperti :

1. Terbatasnya SDM Aparatur yang Memiliki Kualitas dan Kompetensi dalam hal penindakan pelanggaran peraturan daerah;
2. Minimnya Sarana Prasarana dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah dan penertiban (Kendaraan Operasional);
3. Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah yang ada;
4. Belum terpenuhinya 1 (satu) Pos Damkar untuk 1 Kecamatan sehingga masih banyak lokasi kebakaran yang sulit dijangkau;

5. Tugas dan Fungsi damkar yang semakin kompleks tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM Aparatur;
6. Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih sangat kurang;
7. Belum dibentuknya relawan kebakaran di desa/kelurahan sebagaimana yang di amanatkan oleh Permendagri Nomor 114 Tahun 2018 tentang SPM sub Urusan Kebakaran;
8. Pelaksanaan tugas di lapangan belum didukung oleh peralatan dan alat pelindung diri yang memadai.

Pemetaan permasalahan-permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan tugas di lapangan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.12
Pemetaan Permasalahan pelayanan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Analisis Resiko	Mitigasi
1	Belum kondusifnya kondisi keamanan, ketertiban umum serta kehidupan sosial masyarakat	Masih tingginya angka kriminalitas	Rendahnya pengamalan nilai-nilai/norma lokal dan agama dalam kehidupan sehari hari	Pemicu utama tingginya kriminalitas	Koordinasi dengan pihak terkait dalam pembinaan dan penerapan norma local dan agama
		Minimnya sarana dan prasarana pelaksanaan ketertiban, ketentraman dan perlindungan masyarakat	Terbatasnya alat transportasi dan peralatan dalam pelaksanaan penertiban	Kurangnya profesionalisme petugas dalam bertugas, terutama dalam hal penanganan massa dan mediasi konflik.	Pengadaan alat transportasi dan peralatan penanganan massa
		Terbatasnya SDM Aparatur yang memiliki kualitas dan kompetensi	Belum adanya PPNS di Satpol. PP	Penyidikan tindak pidana ringan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah tidak terlaksana	Pelatihan dan pengembangan kompetensi aparatur Satpol. PP
		Kurangnya kesadaran dan pemahaman Masyarakat dalam mematuhi Peraturan Daerah	Kurangnya Sosialisasi ke Masyarakat terkait Peraturan Daerah	Penolakan dan perlawanan saat dilakukan penegakan Peraturan daerah.	Perlu terus dilaksanakan Sosialisasi perda dan perkara kepada masyarakat.

	Masih banyaknya lokasi kebakaran yang jauh dari Pos Damkar	Masih ada 6 kecamatan yang belum memiliki Pos Damkar	Keterlambatan Damkar berdampak pada tingginya kerusakan dan kerugian akibat kebakaran.	Perlu dibentuk minimal 1 Pos Damkar dalam 1 kecamatan untuk mempercepat penanganan kebakaran
	Tugas dan Fungsi damkar yang semakin kompleks tidak dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM Aparatur	Standar kualifikasi Aparatur Damkar Sidrap belum ada yang bersertifikasi sesuai dengan Permendagri No. 16 tahun 2009	Resiko kegagalan dalam penanganan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	Petugas Damkar perlu disertifikasi sesuai Permendagri No. 16 tahun 2009
	Tingkat pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penanggulangan kebakaran masih sangat kurang	Kurangnya Sosialisasi ke Masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran	Kebakaran besar berawal dari kesalahan dalam penanganan kebakaran awal	Sosialisasi tentang cara penanganan kebakaran awal harus sering dilaksanakan di kelompok-kelompok masyarakat
	Lambatnya informasi dan penanganan awal kejadian kebakaran	Belum dibentuknya relawan kebakaran di desa/kelurahan	Lambatnya penanggulangan kebakaran beresiko pada semakin besarnya kebakaran	Pembentukan relawan kebakaran di tingkat desa/kelurahan untuk mempercepat penanggulangan.
	Pelaksanaan tugas di lapangan belum didukung oleh peralatan dan alat pelindung diri yang memadai	Terbatasnya peralatan dan alat pelindung diri yang dimiliki Damkar Sidrap	Timbulnya korban luka maupun jiwa baik dari petugas maupun masyarakat	Pengadaan peralatan Alat pelindung diri yang memadai

2.2.2. Isu Strategis

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau di kedepankan dalam perencanaan pembangunan karena memiliki pengaruh besar terhadap pencapaian sasaran yang merupakan tugas dan tanggung jawab OPD. Isu-isu strategis yang dapat diidentifikasi berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat adalah sebagai berikut :

a. Kemajuan Teknologi

Arus modernisasi dan globalisasi membawa dampak pada kebudayaan manusia, pergeseran pola hidup masyarakat dan perubahan perilaku sosial di tengah masyarakat. Pergeseran pola hidup dan perubahan perilaku sosial umumnya berdampak pada terganggunya ketentraman dan ketertiban masyarakat.

b. Pusat baru pertumbuhan ekonomi

Peningkatan Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Sidenreng Rappang bukan hanya menjadi magnet bagi Investor namun juga bagi pendatang baru yang tidak memiliki modal dan keterampilan. Adanya arus migrasi yang cukup besar dapat memicu pada aktifitas yang dapat mengganggu ketertiban umum seperti gelandangan, pengemis dan anak jalanan serta bangunan-bangunan kumuh yang berpotensi memicu kebakaran.

c. Penyakit Masyarakat

Penyakit masyarakat merupakan isu strategis yang memerlukan perhatian serius dan penanganan komprehensif. Fenomena ini tidak hanya mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga berdampak negatif pada stabilitas sosial, pertumbuhan ekonomi, kualitas hidup penduduk, kesehatan masyarakat dan stabilitas keluarga. Berbagai faktor berkontribusi terhadap peningkatan penyakit sosial ini, termasuk kesenjangan ekonomi, pengangguran, urbanisasi yang tidak terencana, dan lemahnya penegakan hukum.

Untuk mengurangi risiko-risiko terhadap isu strategis di atas, Satpol PP dapat mengambil langkah-langkah mitigasi, antara lain:

1. Meningkatkan sosialisasi: Melakukan sosialisasi Perda dan Perkada secara masif dan merata kepada masyarakat sebelum penegakan hukum dilakukan.
2. Pelatihan dan peningkatan kapasitas : Memberikan pelatihan rutin, khususnya terkait penanganan konflik, teknik negosiasi, dan kepatuhan terhadap SOP.
3. Penguatan kelembagaan : Melakukan penataan ulang kelembagaan untuk mendukung kinerja yang lebih optimal.
4. Koordinasi intensif : Membangun kerja sama yang erat dengan instansi terkait untuk memastikan dukungan dan koordinasi yang efektif saat operasi.
5. Pendekatan humanis : Menerapkan pendekatan persuasif, edukatif, dan humanis (misalnya, asah, asih, asuh) dalam penindakan pelanggaran untuk meminimalisasi konflik.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati, dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih nyata dan terarah berupa tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada hakikatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi pemerintah secara lebih detil dan lebih terinci dan digunakan oleh OPD sebagai acuan dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan serta hasil akhir yang akan di capai.

3.1. Tujuan

Tujuan menggambarkan arah pembangunan yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang. Tujuan yang dirumuskan secara spesifik dan terukur, mengimplementasi program dan kegiatan pembangunan secara lebih terarah, efektif, dan efisien serta dapat diukur keberhasilannya. Adapun tujuan yang harus dicapai oleh Satpol. PP dan Damkar adalah :

“Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat serta meningkatnya kinerja Pelayanan Kebakaran.”

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang lebih mendetail, lebih spesifik, dan diukur dengan indikator kinerja yang relevan. Sasaran ini juga menjadi landasan utama dalam mengembangkan strategi, arah kebijakan, serta program pembangunan prioritas selama periode 2025-2029. Sasaran yang ingin dicapai oleh Satpol. PP dan Damkar adalah :

- Meningkatkan Kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah;
- Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran;
- Meningkatkan tata kelola kinerja dan keuangan.

Tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 beserta dengan

indikator kinerjanya disajikan pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan sasaran Satpol.PP dan Damkar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN											
- Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kebakaran		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	83	100	100	100	100	100		
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda (%)	89	90	90	92	92	95	95	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK) (Menit)	8,3	8,3	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	58,4	60	60	62,31	65,24	68,62	70	

3.3 Strategi

Strategi Renstra PD adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, Teknik merumuskan tujuan dan sasaran, fokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD.

- a. Optimalisasi sumber daya adalah proses pengelolaan dan pemanfaatan secara optimal sumber daya yang dimiliki oleh Satpol. PP dan Damkar dalam meningkatkan ketentraman, dan ketertiban umum serta Perlindungan Masyarakat dan meningkatkan pelayanan Kebakaran, baik sumber daya manusia maupun sumber daya sarana dan prasarana.
- b. Penahapan pembangunan adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Penahapan Renstra Satpol.PP dan Damkar

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
1	2	3	4	5
pemetaan regulasi sektoral,perda ketentraman Umum,perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran	pemetaan regulasi sektoral,perda ketentraman Umum,perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran	pemetaan regulasi sektoral,perda ketentraman Umum,perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran	pemetaan regulasi sektoral,perda ketentraman Umum,perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran	pemetaan regulasi sektoral,perda ketentraman Umum,perlindungan masyarakat, dan penanggulangan kebakaran

- c. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran adalah merupakan proses mendefinisikan sasaran (visi luar) dan tujuan (langkah spesifik

terukur) agar jelas, dapat dicapai, dan selaras dengan visi misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang.

**TABEL 3.3 TEKNIK MERUMUSKAN TUJUAN DAN SASARAN
FINAL RENSTRA PD
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN											
- Meningkatkan Keamanan, Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kebakaran		Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) (%)	100	100	100	100	100	100	100	
			Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)	83	100	100	100	100	100	100	
		Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Persentase Penegakan Perda (%)	89	90	90	92	92	95	95	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK) (Menit)	8,3	8,3	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan	Predikat Nilai Sakip (Angka)	58,40	60	60	62,31	65,24	68,62	70	

- d. Lokus Renstra PD yaitu wilayah prioritas rencana strategis PD akan diterapkan. Dengan pendekatan berbasis data yang kuat sejak tahap awal di tahun 2025, Perangkat Daerah dapat mengidentifikasi secara tepat wilayah-wilayah yang memerlukan intervensi prioritas sesuai dengan tantangan dan potensi yang dimiliki.

Tabel 3.4
Penentuan Lokus Prioritas

No	Sasaran	Keluaran	Lokasi Prioritas
1	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	Penguatan nilai-nilai religius, budaya, dan kearifan lokal dengan penertiban tempat-tempat yang berpotensi timbulnya penyakit masyarakat, seperti transaksi Narkoba, Seks bebas dengan melakukan Sosialisasi Peraturan Daerah dan Penindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah	Di pusat-pusat kegiatan budaya dan Tempat hiburan malam (THM), Rumah-rumah Kost di Kabupaten Sidenreng Rappang dan Kawasan Permukiman Perkotaan
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	Menurunkan capaian tingkat waktu tanggap (Respon time rate) kebakaran dan meningkatkan Presentase Pelayanan dan evakuasi Korban Kebakaran dengan Pembangunan Pos-pos Damkar di tiap kecamatan.	Lokasi-lokasi rawan kebakaran dan jauh dari pos damkar yang ada
3	Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	Meningkatkan Predikat nilai SAKIP	Sekretariat Satpol. PP dan Damkar

- d. Penentuan Program prioritas Renstra PD yaitu program prioritas yang dirancang sebagai instrumen strategis yang secara langsung dan terukur akan mendorong pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah menuju pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan potensi, tantangan, dan kebutuhan spesifik wilayah Sidenreng Rappang.

Tabel 3.5
Penentuan Program Prioritas

Visi/misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program prioritas
Visi “ Sidenreng Rappang Maju dan Sejahtera”					
M5. Mewujudkan Kehidupan Sosial Kemasyarakatan Yang Kondusif, Berbudaya, Beradat Dan Religius	RPJMD Meningkatnya harmonisasi kehidupan sosial masyarakat berbasis nilai budaya, adat dan agama	Meningkatnya Keamanan dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap perda dan perkada	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
	Renstra PD Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan meningkatnya pelayanan pemadaman kebakaran	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Peraturan Daerah	Meningkatnya Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan)	Persentase penegakan Peraturan Daerah	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

3.4. Arah kebijakan

Arah kebijakan Renstra PD adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Berikut penyelarasan arah kebijakan RPJMD dengan arah kebijakan Renstra PD.

Tabel 3.6
Penyelarasan Arah Kebijakan RPJMD dengan Renstra PD

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA SATPOL PP DAN DAMKAR	KET
1	2	3	4	5
		Penguatan Sistem Keamanan terpadu dan Peningkatan Koordinasi antara lembaga dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Penguatan Kebijakan berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat dan tata kelola internal untuk mengoptimalkan Penguatan Sistem Keamanan terpadu Meningkatkan Perlindungan Masyarakat terhadap resiko Kebakaran Memberi Acuan Langkah agar pelaksanaan tugas tetap berada pada Koridor yang ditetapkan	

Untuk merealisasikan target tujuan dan sasaran secara optimal, dibutuhkan beberapa strategi dan arah kebijakan yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah dan arah kebijakan RPJMD. Dari beberapa sasaran dan arah kebijakan pemerintah daerah yang dituangkan dalam RPJMD, yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Satpol. PP dan Damkar adalah Penguatan Sistem Keamanan terpadu dan Peningkatan Koordinasi

antara lembaga dalam Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Tabel 3.7

Penyelarasan Strategi dan Arah kebijakan Satpol.PP dan damkar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
1	2	3	4
Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan meningkatnya kinerja pelayanan kebakaran	1. Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah	1. Meningkatkan pencegahan gangguan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat. 2. Meningkatkan pembinaan, koordinasi dan sinkronisasi secara terpadu 3. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang Perda dan Perkada. 4. Meningkatkan kualitas dan kompetensi SDM aparatur	1. Membentuk tim reaksi cepat dan melaksanakan patroli pada tempat-tempat yang dianggap rawan gangguan ketertiban umum. 2. Penguatan Kebijakan berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban Umum serta perlindungan masyarakat. 3. Sosialisasi kepada masyarakat tentang Perda dan Perkada. 4. Pendidikan dan pelatihan PPNS bagi aparatur yang berkompeten.
	2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran	1. Pemenuhan Tingkat Waktu Tanggap pada Wilayah Manajemen kebakaran. 2. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian kebakaran	1. Penambahan Pos Pemadam Kebakaran di tiap kecamatan. 2. Sosialisasi dan simulasi pencegahan dan pengendalian kebakaran di tingkat desa/kelurahan
	4. Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan	1. Meningkatkan Predikat nilai SAKIP	1. Meningkatkan kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Visi dan misi Bupati dan Wakil bupati yang telah dirumuskan kedalam RPJMD diturunkan menjadi tujuan dan sasaran yang lebih spesifik dan dijabarkan kedalam program, kegiatan, subkegiatan yang akan dilaksanakan selama periode lima tahun kepemimpinan. Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan cascading dari tujuan dan sasaran perangkat daerah yang diselaraskan dengan tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Program adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Kegiatan adalah aktivitas, usaha, atau pekerjaan yang dilakukan dan merujuk pada segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok. Bagian dari suatu kegiatan adalah subkegiatan yang terdiri dari satu atau beberapa jenis belanja sehingga membantu pelaksanaan kegiatan secara lebih terstruktur dan terukur sehingga tujuan kegiatan dapat tercapai dengan lebih efektif.

4.1. Program

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran. Dalam struktur perencanaan pembangunan daerah, Program Perangkat Daerah memiliki posisi strategis sebagai penghubung antara perencanaan makro pada tingkat daerah dengan pelaksanaan kegiatan di tingkat perangkat daerah. Program-program ini dirancang secara sistematis untuk menjawab permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi oleh perangkat daerah, serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Setiap program dilengkapi dengan indikator kinerja yang jelas, target capaian yang terukur, kerangka waktu pelaksanaan, serta kebutuhan pendanaan yang realistis. Program perangkat daerah pada Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat

disajikan pada Tabel 4.1. sebagai berikut :

**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.488.516.000,00		14.269.873.875,00		12.568.765.697,00		10.811.361.344,00		12.632.872.146,00	
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.227.444.625,00		5.328.802.500,00		5.432.694.322,00		5.475.289.969,00		5.496.800.771,00	
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.227.444.625,00	100	5.328.802.500,00	100	5.432.694.322,00	100	5.475.289.969,00	100	5.496.800.771,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keteribatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.809.271.375,00		2.189.771.375,00		2.184.771.375,00		2.184.771.375,00		2.184.771.375,00	
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%)	100	100	100	1.809.271.375,00	100	2.189.771.375,00	100	2.184.771.375,00	100	2.184.771.375,00	100	2.184.771.375,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keteribatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.451.800.000,00		6.751.300.000,00		4.951.300.000,00		3.151.300.000,00		4.951.300.000,00	
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	4.451.800.000,00	100	6.751.300.000,00	100	4.951.300.000,00	100	3.151.300.000,00	100	4.951.300.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Ketenteraman Dan Keteribatan Umum Serta Perlindungan Masyarakat
TOTAL KESELURUHAN					11488516000.00		14269873875.00		12568765697.00		10811361344.00		12632872146.00	

Pada Tabel 4.1 diatas, terdapat 3 program yang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara keseluruhan. Ketiga program tersebut adalah :

- 1.05.01-Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- 1.05.02-Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
- 1.05.04-Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

4.2. Kegiatan

Kegiatan adalah Tindakan-tindakan konkret yang dilakukan untuk menjalankan program atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Program/kegiatan/sub kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah sekumpulan rencana kerja dimana perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk mencegah isu-isu penting terkait penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dalam pembangunan daerah. Secara teknis, perumusan kegiatan dari program yang telah ditetapkan dapat dilihat pada tabel 4.2 dibawah.

4.3. Subkegiatan

Subkegiatan adalah bentuk aktifitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan Fungsi. Perumusan subkegiatan bertujuan untuk mempercepat pemrosesan dalam merencanakan penganggaran kebutuhan dana dari berbagai program, kegiatan, dan sub kegiatan pada setiap bidang yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, yang disajikan dalam format RKA-SKPD dan harus dapat memberikan informasi yang jelas tentang tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Adapun teknik perumusan program, kegiatan dan subkegiatan dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah :

Tabel 4.2
Teknik Merumuskan Program / Kegiatan/ Sub Kegiatan
Final Renstra Satpol PP dan Damkar

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN							
- Meningkatnya Keamanan, Ketertiban dan Ketenteraman Masyarakat	Meningkatnya Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dan Meningkatnya Kinerja Pelayanan Kebakaran	Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Peraturan Daerah	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	presentase Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketenteraman, Keindahan) (%)		
					Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (%)		
					Persentase Penegakan Perda (%)		
					Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%)	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani adalah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
					Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
					Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani adalah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
					Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja	
				Presentase penegakan Perda,Perbub dan peraturan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	

					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
				Presentase ASN Satol PP yang sudah Mengikuti pembinaan pembinaan Diklat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemadam Kebakaran			Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK) (Menit)		
			Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran		Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
				presentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

				Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	

					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
					Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	
				presentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	
					Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	

					Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	
		Meningkatnya Tata Kelola Kinerja dan Keuangan			Predikat Nilai Sakip (Angka)		
		Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien			Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
			Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	

					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	

				Cakupan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Dari tabel teknik perumusan program, kegiatan dan subkegiatan diatas, dapat disimpulkan bahwa Satpol. PP dan Damkar selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat menjalankan 3 Program, 13 Kegiatan dan 59 subkegiatan. Penjabaran dari program dan kegiatan tersebut adalah :

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1.1. Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - 1.2. Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
 - 1.3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
2. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - 2.1. Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 2.2. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran
3. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - 3.1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - 3.2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - 3.3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - 3.4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - 3.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - 3.6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - 3.7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - 3.8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif diuraikan pada tabel 4.3 sebagai berikut :

**TABEL 4.3 RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				11.488.516.000,00		14.269.873.875,00		12.568.765.697,00		10.811.361.344,00		12.632.872.146,00		
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.227.444.625,00		5.328.802.500,00		5.432.694.322,00		5.475.289.969,00		5.496.800.771,00		
Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	5.227.444.625,00	100	5.328.802.500,00	100	5.432.694.322,00	100	5.475.289.969,00	100	5.496.800.771,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penggangan, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				17.916.675,00		17.916.675,00		17.916.675,00		17.916.675,00		17.916.675,00		
Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penggangan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	9	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	9		9		9		9		9			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		9		9		9		9		9			
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00		
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.537.325,00		2.537.325,00		2.537.325,00		2.537.325,00		2.537.325,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	9	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00		
1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD				2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00		
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00		
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00		
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00		
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.724.028.000,00		4.825.385.875,00		4.929.277.697,00		4.971.873.344,00		4.993.384.146,00		
Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	18	4.724.028.000,00	18	4.825.385.875,00	18	4.929.277.697,00	18	4.971.873.344,00	18	4.993.384.146,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	91		106		121		136		151			
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.720.028.000,00		4.821.385.875,00		4.925.277.697,00		4.967.873.344,00		4.989.384.146,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	91	4.720.028.000,00	106	4.821.385.875,00	121	4.925.277.697,00	136	4.967.873.344,00	151	4.989.384.146,00		
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00		
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00		
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00		
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		
Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00		
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				109.322.900,00		109.322.900,00		109.322.900,00		109.322.900,00		109.322.900,00		
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	
--	--	---	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	---	--------------	--

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				107.322.900,00		107.322.900,00		107.322.900,00		107.322.900,00		107.322.900,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00		
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				168.989.050,00		168.989.050,00		168.989.050,00		168.989.050,00		168.989.050,00		
Cakupan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	168.989.050,00	1	168.989.050,00	1	168.989.050,00	1	168.989.050,00	1	168.989.050,00		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35		35		35		35		35			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00		
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00		
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				2.445.450,00		2.445.450,00		2.445.450,00		2.445.450,00		2.445.450,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00		
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				10.563.000,00		10.563.000,00		10.563.000,00		10.563.000,00		10.563.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00		

1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144.030.600,00		144.030.600,00		144.030.600,00		144.030.600,00		144.030.600,00		
Tertindakannya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00		
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1		1		1		1		1			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00		
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00		
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				119.600.000,00		119.600.000,00		119.600.000,00		119.600.000,00		119.600.000,00		
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15	15		15		15		15		15			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00		
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00		
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00		
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00		

1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				50.588.000,00		50.588.000,00		50.588.000,00		50.588.000,00		50.588.000,00		
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	50.588.000,00	1	50.588.000,00	1	50.588.000,00	1	50.588.000,00	1	50.588.000,00		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18		18		18		18		18			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3		3		3		3		3			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0		1		1		1		1			
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39.588.000,00		39.588.000,00		39.588.000,00		39.588.000,00		39.588.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00		
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00		
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				1.809.271.375,00		2.189.771.375,00		2.184.771.375,00		2.184.771.375,00		2.184.771.375,00		
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertamanan Dan Keterlibatan Umum	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%)	100	100	1.809.271.375,00	100	2.189.771.375,00	100	2.184.771.375,00	100	2.184.771.375,00	100	2.184.771.375,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	

1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				1.609.771.375,00		1.694.771.375,00		1.689.771.375,00		1.689.771.375,00		1.689.771.375,00	DAN PEMADAM KEBAKARAN	
presentase Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		0	12	1.609.771.375,00	12	1.694.771.375,00	12	1.689.771.375,00	12	1.689.771.375,00	12	1.689.771.375,00		
Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)		4	4		4		4		4		4			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan (laporan)	80	4		4		4		4		4			
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	84	84		84		84		84		84			
	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	35	45		45		45		45		45			
	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	5		5		5		5		5			
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		

Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00		
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				11.000.000,00		16.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	1	11.000.000,00	1	16.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00		
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00		
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00		
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan				1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	80	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00		
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		

Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	84	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00		
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah				20.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani/umlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	12	20.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00		
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum				37.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	4	4	37.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja				75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpra	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	35	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00		
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota				129.500.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		
Presentase penegakan Perda.Perbud dan peraturan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	80	129.500.000,00	80	425.000.000,00	80	425.000.000,00	80	425.000.000,00	80	425.000.000,00		
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	80	4		4		4		4					
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	11		11		11		11					
1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				29.500.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		

Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	11	29.500.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00		
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	80	4	50.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00		
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	80	50.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00		
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Presentase ASN Satol PP yang sudah Mengikuti pembinaan pembinaan Diklat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS				70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				4.451.800.000,00		6.751.300.000,00		4.951.300.000,00		3.151.300.000,00		4.951.300.000,00		
Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	4.451.800.000,00	100	6.751.300.000,00	100	4.951.300.000,00	100	3.151.300.000,00	100	4.951.300.000,00	1.05.000.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				4.375.800.000,00		6.674.800.000,00		4.874.800.000,00		3.074.800.000,00		4.874.800.000,00		
Presentase pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4	4.375.800.000,00	4	6.674.800.000,00	4	4.874.800.000,00	4	3.074.800.000,00	4	4.874.800.000,00		
	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12	12		12		12		12		12			

	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	4		4		4		4		4		
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	1		1		1		1		1		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	1		2		1		1		1		
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				2.086.000.000,00		2.086.000.000,00		2.086.000.000,00		2.086.000.000,00		2.086.000.000,00	
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00		
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00		
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran				175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)				1.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	1	1.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00		
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri				1.737.800.000,00		3.837.800.000,00		2.037.800.000,00		237.800.000,00		2.037.800.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	1	1.737.800.000,00	2	3.837.800.000,00	1	2.037.800.000,00	1	237.800.000,00	1	2.037.800.000,00		
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran				76.000.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Presentase, pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/Kota	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	106	76.000.000,00	106	76.500.000,00	106	76.500.000,00	106	76.500.000,00	106	76.500.000,00		
	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	440		440		440		440		440			
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat				75.000.000,00		75.500.000,00		75.500.000,00		75.500.000,00		75.500.000,00		

Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	440	75.000.000,00	440	75.500.000,00	440	75.500.000,00	440	75.500.000,00	440	75.500.000,00		
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran pada Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00		

**TABEL 4.3. RENCANA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN PER LOKASI DAN PENDANAAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					11.488.516.000,00		14.269.873.875,00		12.568.765.697,00		10.811.361.344,00		12.632.872.146,00			
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.227.444.625,00		5.328.802.500,00		5.432.694.322,00		5.475.289.969,00		5.496.800.771,00			

Tercapainya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (%)	100	100	100	5.227.444.625,00	100	5.328.802.500,00	100	5.432.694.322,00	100	5.475.289.969,00	100	5.496.800.771,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN			
1.05.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					17.916.675,00		17.916.675,00		17.916.675,00		17.916.675,00		17.916.675,00				
Cakupan Pelaksanaan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	9	9	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00	9	17.916.675,00				
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	9		9		9		9		9					
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	5		5		5		5		5					
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0		9		9		9		9		9					
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)			9		9		9		9		9					
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0		5		5		5		5		5					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025	2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.05.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00			Batu Lappa	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	0	0	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00				
1.05.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					2.537.325,00		2.537.325,00		2.537.325,00		2.537.325,00		2.537.325,00			Batu Lappa	
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	9	9	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00	9	2.537.325,00				

1.05.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		Batu Lappa		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)		9		2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00				
1.05.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		Batu Lappa		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	0	9		3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00	9	3.500.000,00				
1.05.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD					2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		2.439.675,00		Batu Lappa		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	0	0	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00	9	2.439.675,00				
1.05.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		3.500.000,00		Batu Lappa		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	0	5		3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00	5	3.500.000,00				
1.05.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					4.724.028.000,00		4.825.385.875,00		4.929.277.697,00		4.971.873.344,00		4.993.384.146,00				
Cakupan Penyediaan Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	12		4.724.028.000,00	12	4.825.385.875,00	12	4.929.277.697,00	12	4.971.873.344,00	12	4.993.384.146,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	0	18		18		18		18		18		18				
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	65	91	106		121		136		151						

	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	12		12		12		12		12				
1.05.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					4.720.028.000,00		4.821.385.875,00		4.925.277.697,00		4.967.873.344,00		4.989.384.146,00			Batu Lappa
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	66	65	91	4.720.028.000,00	106	4.821.385.875,00	121	4.925.277.697,00	136	4.967.873.344,00	151	4.989.384.146,00			
1.05.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			Batu Lappa
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	0	0	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00	12	1.000.000,00			
1.05.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00			Batu Lappa
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0		12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00	12	2.000.000,00			
1.05.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00			Batu Lappa
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	0		18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00	18	1.000.000,00			
1.05.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00			
Cakupan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1		1		1		1		1					

1.05.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.03.0007 - Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					109.322.900,00		109.322.900,00		109.322.900,00		109.322.900,00		109.322.900,00			
Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00	1	109.322.900,00			
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1		1		1		1						
	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
1.05.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					107.322.900,00		107.322.900,00		107.322.900,00		107.322.900,00		107.322.900,00		Batu Lappa	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1		1	107.322.900,00	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00	1	107.322.900,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah					168.989.050,00		168.989.050,00		168.989.050,00		168.989.050,00		168.989.050,00			
Cakupan Administrasi Umum Perangkat	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4		4	168.989.050,00	4	168.989.050,00	4	168.989.050,00	4	168.989.050,00	4	168.989.050,00			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35		35		35		35		35		35				
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1				
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12		12		12		12		12				
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1		1		1		1		1		1				
1.05.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		500.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00	5	500.000,00			
1.05.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		9.450.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12		12	9.450.000,00	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00	12	9.450.000,00			
1.05.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					2.445.450,00		2.445.450,00		2.445.450,00		2.445.450,00		2.445.450,00		Batu Lappa	
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1		1	2.445.450,00	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00	1	2.445.450,00			
1.05.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					10.563.000,00		10.563.000,00		10.563.000,00		10.563.000,00		10.563.000,00		Batu Lappa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	

Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00	1	10.563.000,00			
1.05.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		2.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	4	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00	4	2.000.000,00			
1.05.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				144.030.600,00		144.030.600,00		144.030.600,00		144.030.600,00		144.030.600,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	35	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00	35	144.030.600,00			
1.05.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00		34.000.000,00			
Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00	1	34.000.000,00		
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	2		2	2	2	2	2	2	2			
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1	1	1	1	1	1	1			
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1		1	1	1	1	1	1	1			
1.05.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN		
			2025		2026		2027		2028		2029					2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				TARGET	PAGU

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
1.05.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00			
1.05.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00			
1.05.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					119.600.000,00		119.600.000,00		119.600.000,00		119.600.000,00		119.600.000,00			
Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00	12	119.600.000,00			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12						

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN					PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026	2027	2028	2029			

(01)	(02)	(03)	TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12		12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15	15	15		15		15		15		15				
1.05.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	15	15	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00	15	1.000.000,00			
1.05.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		48.600.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00	12	48.600.000,00			
1.05.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00	12	5.000.000,00			
1.05.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		65.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00	12	65.000.000,00			
1.05.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					50.588.000,00		50.588.000,00		50.588.000,00		50.588.000,00		50.588.000,00			
Cakupan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18		18	50.588.000,00	18	50.588.000,00	18	50.588.000,00	18	50.588.000,00	18	50.588.000,00			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0		1		1		1		1				

INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN	PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
----------------------------	---------------------------------	------------------	--------	------------

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT		BASELINE TAHUN 2024	2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	3		3		3		3		3				
1.05.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					39.588.000,00		39.588.000,00		39.588.000,00		39.588.000,00		39.588.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	18		18	39.588.000,00	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00	18	39.588.000,00			
1.05.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3	3	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00	3	5.000.000,00			
1.05.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	0	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00			
1.05.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00			
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					1.809.271.375,00		2.189.771.375,00		2.184.771.375,00		2.184.771.375,00		2.184.771.375,00			
Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertarikan Dan Keterampilan Umum	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda (%)	100	100	100	1.809.271.375,00	100	2.189.771.375,00	100	2.184.771.375,00	100	2.184.771.375,00	100	2.184.771.375,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota					1.609.771.375,00		1.694.771.375,00		1.689.771.375,00		1.689.771.375,00		1.689.771.375,00			
presentase Gangguan Ketenteraman dan ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	0	12	1.609.771.375,00	12	1.694.771.375,00	12	1.689.771.375,00	12	1.689.771.375,00	12	1.689.771.375,00			
	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	0	5		5		5		5		5				
	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	35	45	45		45		45		45		45				
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1				
	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	5		5		5		5		5				
Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12					
Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	84	84	84		84		84		84		84					

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	80	80	4		4		4		4		4				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	4	4	4		4		4		4		4				
1.05.02.2.01.0004 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum					128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		128.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Dokumen)	12	12	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00	12	128.000.000,00			
1.05.02.2.01.0006 - Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum					11.000.000,00		16.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		11.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan (Dokumen)	0	0	1	11.000.000,00	1	16.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00	1	11.000.000,00			
1.05.02.2.01.0008 - Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat					5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		KAB. SIDENRENG RAPPANG	
Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan (Dokumen)	0	0	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.000.000,00			
1.05.02.2.01.0014 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		Batu Lappa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas	Jumlah anggota Satpol PP dan Satlinmas yang ditingkatkan kapasitas SDMnya melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas (Orang)	0	0	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00	5	100.000.000,00			
1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan					1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		1.223.771.375,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan (laporan)	80	80	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00	4	1.223.771.375,00			
1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa					10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan (Laporan)	84	84	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00	84	10.000.000,00			
1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah					20.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		62.000.000,00		Batu Lappa	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Pelayanan dasar kepada warga negara yang terkena Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani (Laporan)	0	0	12	20.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00	12	62.000.000,00			
1.05.02.2.01.0018 - Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum					37.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia (Unit)	4	4	4	37.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00	4	75.000.000,00			
1.05.02.2.01.0025 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja					75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		Batu Lappa	
Tertelaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas (Orang)	35	45	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00	45	75.000.000,00			
1.05.02.2.02 - Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota					129.500.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00		425.000.000,00			
Presentase penegakan Perda,Perbub dan peraturan Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	80	129.500.000,00	80	425.000.000,00	80	425.000.000,00	80	425.000.000,00	80	425.000.000,00			
	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	80	80	4		4		4		4						
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	11		11		11		11						

1.05.02.2.02.0010 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					29.500.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		125.000.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	11	29.500.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00	11	125.000.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.05.02.2.02.0011 - Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah					50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Batu Lappa		
Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP (Laporan)	80	80	4	50.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00	4	150.000.000,00				
1.05.02.2.02.0012 - Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					50.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		Batu Lappa		
Terlaksananya Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah (Laporan)	0	0	80	50.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00	80	150.000.000,00				
1.05.02.2.03 - Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00				
Presentase ASN Satol PP yang sudah Mengikuti pembinaan pembinaan Diklat PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				
1.05.02.2.03.0006 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS					70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		Batu Lappa		
Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda (Laporan)	0	0	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00				
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					4.451.800.000,00		6.751.300.000,00		4.951.300.000,00		3.151.300.000,00		4.951.300.000,00				

Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	4.451.800.000,00	100	6.751.300.000,00	100	4.951.300.000,00	100	3.151.300.000,00	100	4.951.300.000,00	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN		
1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					4.375.800.000,00		6.674.800.000,00		4.874.800.000,00		3.074.800.000,00		4.874.800.000,00			

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
presentasepencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,danpenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	1	4.375.800.000,00	1	6.674.800.000,00	1	4.874.800.000,00	1	3.074.800.000,00	1	4.874.800.000,00				
	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	4		4		4		4		4					
	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1		1		1		1		1					
	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12	12	12		12		12		12		12					
	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	4	1		2		1		1		1					

	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	4		4		4		4		4				
1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					2.086.000.000,00		2.086.000.000,00		2.086.000.000,00		2.086.000.000,00		2.086.000.000,00			Batu Lappa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN
			2025	2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Tersedianya Dokumen NSPM yang Berkaitan Dengan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya (Dokumen)	12	12	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00	12	2.086.000.000,00			
1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota (Laporan)	0	0	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00	4	350.000.000,00			
1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran					25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran (Dokumen)	0	0	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00	4	25.000.000,00			
1.05.04.2.01.0004 - Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	

Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan yang Berkaitan dengan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Penanganan Kebakaran yang Disebabkan B3 dalam Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	0	0	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00		
1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran					175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		175.000.000,00		Batu Lappa
Tersedianya Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran (Orang)	0	0	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00	1	175.000.000,00		
1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)					1.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		Batu Lappa

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											PERANGKAT DAERAH	LOKASI	KETERANGAN	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET				PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
Tersedianya Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) (Dokumen)	0	0	1	1.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00	1	200.000.000,00				
1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri					1.737.800.000,00		3.837.800.000,00		2.037.800.000,00		237.800.000,00		2.037.800.000,00		Batu Lappa		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait (Unit)	0	4	1	1.737.800.000,00	2	3.837.800.000,00	1	2.037.800.000,00	1	237.800.000,00	1	2.037.800.000,00				
1.05.04.2.04 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran					76.000.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00		76.500.000,00				
presentasepencegahan,pengendalian,pemadaman,penyelamatan,danpenanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah kabupaten/kota	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0	440	76.000.000,00	440	76.500.000,00	440	76.500.000,00	440	76.500.000,00	440	76.500.000,00				

	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	106		106		106		106		106				
1.05.04.2.04.0001 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat					75.000.000,00		75.500.000,00		75.500.000,00		75.500.000,00		75.500.000,00		Batu Lappa	
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat Setiap Tahunnya	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya (Orang)	0	0	440	75.000.000,00	440	75.500.000,00	440	75.500.000,00	440	75.500.000,00	440	75.500.000,00			
1.05.04.2.04.0002 - Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran					1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		1.000.000,00		Batu Lappa	
Tersedianya Dokumen Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran di Desa dan Kelurahan Setiap Tahunnya	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya (Desa/Kelurahan)	0	0	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00	106	1.000.000,00			

Dari tabel Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan diatas, menjelaskan tentang rencana pendanaan untuk urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tahun 2026–2030. Adapun secara garis besar rencana pendanaannya adalah sebagai berikut :

- Tahun 2026 sebesar Rp. 11.488.516.000,-
- Tahun 2027 sebesar Rp. 14.269.873.875,-
- Tahun 2028 sebesar Rp. 12.568.765.697,-
- Tahun 2029 sebesar Rp. 10.811.361.344,-
- Tahun 2030 sebesar Rp. 12.632.872.146,-

Dari perencanaan pendanaan bidang urusan diatas kemudian di uraikan kedalam rencana pendanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan untuk tahun 2026-2030. Adapun rencana pendanaan untuk masing-masing program adalah sebagai berikut :

- Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - Tahun 2026 sebesar Rp. 5.227.444.625,-
 - Tahun 2027 sebesar Rp. 5.328.802.500,-
 - Tahun 2028 sebesar Rp. 5.432.694.322,-
 - Tahun 2029 sebesar Rp. 5.475.289.969,-
 - Tahun 2030 sebesar Rp. 5.496.800.771,-
- Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Tahun 2026 sebesar Rp. 1.809.271.375,-
 - Tahun 2027 sebesar Rp. 2.189.771.375,-
 - Tahun 2028 sebesar Rp. 2.184.771.375,-
 - Tahun 2029 sebesar Rp. 2.184.771.375,-
 - Tahun 2030 sebesar Rp. 2.184.771.375,-
- Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran
 - Tahun 2026 sebesar Rp. 4.451.800.000,-
 - Tahun 2027 sebesar Rp. 6.751.300.000,-
 - Tahun 2028 sebesar Rp. 4.951.300.000,-
 - Tahun 2029 sebesar Rp. 3.151.300.000,-

- Tahun 2030 sebesar Rp. 4.951.300.000,-

Tabel 4.4

**Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas
Pembangunan Rentra PD**

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN				
1.	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.01 - Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.02.2.01.0015 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	
			1.05.02.2.01.0016 - Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	
			1.05.02.2.01.0017 - Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	
2.	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Meningkatnya Layanan Pencegahan dan Penyelamatan Kebakaran	1.05.04.2.01 - Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0001 - Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0002 - Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
			1.05.04.2.01.0003 - Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0007 - Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	
			1.05.04.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	
			1.05.04.2.01.0017 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	

4.4. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN									
1.	Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	%	100	100	100	100	100	100	100	
2.	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	83	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Penegakan Perda	%	89	90	90	92	92	95	95	
4.	Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) Daerah Layanan Wilayah Majamenen Kebakaran (WMK)	Menit	8,3	8,3	8,4	8,4	8,3	8,2	8,2	
5.	Predikat Nilai Sakip	Angka	58,4	60	60	62,31	65,24	68,62	70	
6.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	83	100	100	100	100	100	100	

Pada *tabel 4.5* diatas dapat diuraikan target pelayanan pada Indikator Kinerja Utama tahun 2025-2030. Indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP dan Pemadam Kebakaran (Damkar) fokus pada peningkatan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah (Perda), serta peningkatan kualitas penanganan bahaya kebakaran. Indikatornya termasuk tingkat penyelesaian pelanggaran K3, persentase penegakan Perda, dan tingkat waktu tanggap penanganan kebakaran. Berikut adalah beberapa indikator kinerja utama (IKU) Satpol PP dan Damkar :

1. Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum diukur dengan Persentase Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) dengan Formulasi :

$$\boxed{\text{Persentase Peningkatan Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan}} = \frac{\text{Jumlah Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan}}{\text{Jumlah Laporan Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan}} \times 100$$

2. Jumlah kasus kebakaran yang ditangani tepat waktu diukur dengan Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dengan Formulasi :

$$\boxed{\text{Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}} = \frac{\text{Jumlah layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dalam waktu Tanggap}}{\text{Jumlah seluruh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}} \times 100$$

3. Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah Diukur dari jumlah pelanggaran Perda yang berhasil diselesaikan dibandingkan dengan total pelanggaran Peraturan Daerah yang dilaporkan. Untuk target tahun 2025-2026 adalah 90%, tahun 2027-2028 adalah 92% dan tahun 2029-2030 adalah 95%. Perbedaan target ini diproyeksikan untuk terbitnya Peraturan Daerah yang baru dan masih perlu

disosialisasikan. Adapun formulasi capaiannya adalah sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Persentase Penegakan Peraturan Daerah}} = \frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang berhasil di tegakkan}}{\text{Jumlah seluruh pelanggaran Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Trantibumlinmas}} \times 100$$

4. Tingkat waktu tanggap (Rensponse Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) berdasarkan Permendagri Nomor 114 tahun 2018 adalah bahwa dalam setiap WMK memiliki luas layanan dalam radius 7,5 Km² dengan response time ratenya adalah 15 menit. Jadi semua layanan kebakaran dalam WMK harus dicapai maksimal 15 menit sejak diterimanya informasi kebakaran sampai siap melaksanakan pemadaman. Realisasi capaian untuk tahun 2024 adalah 8,3 menit. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh jarak ke lokasi kebakaran, kondisi jalan menuju kebakaran dan kondisi operasional kendaraan pemadam kebakaran. Sedangkan target untuk tahun 2025-2030 lebih dari 8 menit. Target tersebut mengacu pada capaian tahun sebelumnya. Untuk formulasi capaiannya adalah sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Tingkat Waktu Tanggap (Rensponse Time Rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)}} = \frac{\text{Jumlah waktu tanggap (Response Time Rate)}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten/Kota}} = \text{Menit}$$

5. Target Predikat Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2026-2030 adalah 70. Penilaian Sakip meliputi empat komponen dengan bobot berbeda, terdiri dari perencanaan kinerja (30), pengukuran kinerja (30), pelaporan kinerja (15), dan evaluasi akuntabilitas kinerja (25).

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT										
2.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	positif	%	80	80	80	80	80	80	80	
4.	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	positif	%	89	90	90	92	92	93	95	
5.	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	positif	Menit	7,8	8	8,2	8,5	8,1	8,2	8,1	

Pada *tabel 4.6* diatas dapat diuraikan target pelayanan pada Indikator Kinerja Kunci tahun 2025-2030. Formulasi capaian target pada indikator IKK dapat disajikan sebagai berikut :

1. Cakupan penunjang urusan pemerintahan daerah meliputi administrasi umum, kepegawaian, pengelolaan barang milik daerah dan penyediaan jasa penunjang. Target cakupan penunjang urusan pemerintahan Daerah tahun 2025-2030 adalah 100 % dengan Formulasi :

$$\boxed{\text{Cakupan penunjang urusan Pemerintah Daerah}} = \frac{\text{Jumlah Peraturan Daerah yang berhasil di tegakkan}}{\text{Jumlah seluruh Peraturan Daerah yang berkaitan dengan Trantibumlinmas}} \times 100$$

2. Target Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda tahun 2025-2030 adalah 100 % dengan formulasi sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda}} = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda}}{\text{Jumlah warga negara dalam satu wilayah kecamatan}} \times 100$$

3. Target Persentase Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran tahun 2025-2030 adalah 100 % dengan formulasi sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran}} = \frac{\text{Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran di kab/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh dinas pemadam kebakaran}}{\text{Jumlah seluruh layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban}} \times 100$$

**TABEL 4.7 INDIKATOR KINERJA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN										
I	ASPEK DAYA SAING DAERAH									
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkada	%	100	100	100	100	100	100	100	
II	ASPEK PELAYANAN UMUM									
1	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Akibat dari Penegakan Hukum Perda	%	100	100	100	100	100	100	100	
2	Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Ppenyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100	
III	INDIKATOR KINERJA KUNCI									
1	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	Menit	7,8	8	8,2	8,5	8,1	8,2	8,1	
2	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	%	80	80	80	80	80	80	80	
3	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	89	90	90	92	92	93	95	
4	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu upaya pemerintah dalam peningkatan pelayanan kepada masyarakat yaitu penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang bertujuan memberikan hak pelayanan bagi masyarakat. Salah satu Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal adalah Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal pasal 14 ayat (2) disebutkan bahwa rencana pemenuhan Pelayanan Dasar ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penetapan target Indikator Kinerja yang berkaitan dengan SPM Satpol. PP dan Damkar adalah sebagai berikut :

Tabel 4.8
**Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kondisi awal 2024	Target RPJMD					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	100	100	100	100	100	100	100
2	Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	100	100	100	100	100	100

Pada *tabel 4.7* diatas dapat diuraikan target pelayanan pada Indikator Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2025-2030 adalah 100 %. Formulasi capaian target pada indikator SPM dapat disajikan sebagai berikut :

$$\boxed{\text{Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Akibat Dari Penegakan Hukum Perda}} = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda}}{\text{Jumlah warga negara dalam satu wilayah kecamatan}} \times 100$$

$$\boxed{\text{Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran}} = \frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran}}{\text{Jumlah warga negara yang terdampak kebakaran di Kab/Kota}} \times 100$$

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 – 2029 merupakan perwujudan perencanaan secara terpadu dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, serta pengelolaan sumber daya manusia dan pelaksanaan kebijakan yang di percayakan kepada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2025 - 2029 merupakan rencana pembangunan selama 5 (lima) tahun yang memuat Visi dan misi pemerintahan terpilih yang di jabarkan dalam bentuk tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan dan selanjutnya di susun menjadi program dan kegiatan yang akan di implementasikan dalam pelaksanaan tugas penertiban, penegakan peraturan daerah, perlindungan masyarakat dan pemadaman kebakaran.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis (RENSTRA) sangat ditentukan oleh kesamaan tujuan, sasaran dan keterpaduan serta komunikasi dalam menciptakan sinergi antara upaya segenap jajaran Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Sidenreng Rappang. Sebagai suatu dokumen perencanaan yang bersifat strategis, sudah barang tentu Rencana Strategis (Renstra) ini tetap terbuka untuk langkah – langkah penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi masa mendatang.

Pelaksanaan Renstra berpedoman pada prinsip-prinsip good governance, perencanaan berbasis hasil, transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Kaidah pelaksanaan yang digunakan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta peraturan pelaksanaannya seperti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2

Tahun 2025. Sebagai bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, pelaksanaan Renstra dilengkapi dengan mekanisme pengendalian dan evaluasi yang terstruktur. Pengendalian dilakukan melalui monitoring secara periodik terhadap pelaksanaan program dan kegiatan oleh perangkat daerah. Sementara itu, evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap capaian kinerja pembangunan, yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dan Evaluasi Renstra secara tahunan maupun akhir periode. Melalui implementasi yang konsisten, sinergis, dan didukung oleh komitmen seluruh pemangku kepentingan, diharapkan Renstra ini dapat menjadi road map yang strategis dalam pelaksanaan ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat.

Pangkajene Sidenreng,

Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran



USMAN, S.Sos

NIP. 19651231 198611 1 045